

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

PENDEKATAN *KNOWLEDGE COMMUNITY* DALAM PEMETAAN SOSIAL JEJARING KELEMBAGAAN DESA

Selvi Diana Meilinda ^a Eko Budi Sulistio ^b dan Syamsul Ma'arif ^c

^a Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Lampung

^b Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Lampung

^c Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Lampung

e-mail : ^a selvi.meilinda@fisip.unila.ac.id , ^b ekobudi.sulistio@fisip.unila.ac.id ^c syamsul.maarif@fisip.unila.ac.id

Abstrak

Para penulis menganalisis dan menguraikan bentuk pendekatan *knowledge community* dalam tahapan pemetaan sosial jejaring kelembagaan desa. Dari 2 bentuk *knowledge community* yaitu pengetahuan pragmatis dan pengetahuan supranatural, pemetaan jejaring kelembagaan desa dominan menggunakan pengetahuan supranatural. Pendekatan ini berfokus pada perhatian bentuk dasar aturan, norma-norma, nilai-nilai yang dihasilkan oleh budaya, agama dan moral. Selain mengemukakan bentuk, penulis juga mengurai tahapan pemetaan dengan pendekatan *knowledge community* melalui dialog dengan informan kunci, FGD, wawancara lembaga, dan penyusunan mini survey hingga memperoleh gambaran utuh peran dan kepentingan jejaring kelembagaan desa, penulis menyarankan untuk mengelaborasi dengan bentuk pengetahuan pragmatis yang objektif dan dapat diamati dengan cara *explanatory knowledge* dan *descriptive knowledge*.

Kata Kunci: *Knowledge Community, Pemetaan Sosial, Jejaring Kelembagaan Desa*

The Knowledge Community Approach In Social Mapping Of Village Institutional Network

Abstract

The authors analyze and describe the shape of the knowledge community approach in the stages of social mapping of village institutional networks. From 2 forms of knowledge community, namely pragmatic knowledge and supernatural knowledge, the mapping of dominant village institutional networks uses supernatural knowledge. This approach focuses on attention to the basic forms of rules, norms, values produced by culture, religion and morals. In addition to expressing the form, the author also passes the stages of mapping with the knowledge community approach through dialogue with key informants, FGD, agency interviews, and the preparation of a mini survey to get a complete picture of the role and interests of the village institutional network, the authors suggest to elaborate with an objective pragmatic form of knowledge and can be observed by *explanatory knowledge* and *descriptive knowledge*.

Keywords: *Knowledge Community, Social Mapping, Village Institutional Networks*

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

A. PENDAHULUAN

Tulisan ini mengurai mengenai metode pemetaan sosial jejaring kelembagaan desa melalui pendekatan *knowledge community*. Pemetaan sosial memerlukan pemahaman mengenai kerangka konseptualisasi masyarakat yang dapat membantu dalam membandingkan elemen-elemen masyarakat antara desa satu dengan desa lainnya. Pemetaan sosial selama ini menggunakan metode *Rapid Apraisal Method* yaitu metode yang digunakan dengan cara cepat dan murah untuk mengumpulkan informasi mengenai pandangan dan masukan dari populasi sasaran dan stakeholders lainnya mengenai kondisi geografis, sosial dan ekonomi. Selain itu, terdapat beberapa pendekatan pemetaan sosial dalam konteks pembangunan masyarakat yang sejalan dengan fenomena dan situasi kondisi saat ini yaitu, penghidupan berkelanjutan (*sustainable livelihood*), tata pemerintahan yang baik (*good governance*), kritik partisipasi (*critique participation*), penghapusan kemiskinan (*poverty reduction*) pendekatan berbasis hak (*right based approach*). Pendekatan ini kemudian menemui titik kritis kelemahannya masing masing, hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa pendekatan pemetaan sosial selama ini mendevaluasi *knowledge community* atau pengetahuan lokal masyarakat, yang menjadi antithesis dari pengembangan masyarakat (Ife dan Tesoriero, 2008).

Knowledge community dimaknai sebagai pengetahuan lokal masyarakat dalam manifestasi transformasi sosial masyarakat yang dengan menggunakan dorongan inovasi dan kreativitas mampu mengiringi perkembangan arus globalisasi (Rudito & Famiola, 2008). Merespon UU Desa no. 6 tahun 2014 tentang desa, pemerintah desa di Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus Propinsi Lampung giat melakukan pemetaan desa, terutama memetakan jejaring kelembagaan desa. Hal ini masih masih jamak terjadi dalam kerangka implementasi kebijakan setingkat desa. Pemetaan sosial selama ini bertujuan untuk mengetahui kondisi sosial, ekonomi, kelembagaan, pembangunan dan budaya di desa. Hal ini merupakan suatu data pengetahuan yang penting dalam merumuskan kebijakan kebijakan ataupun program yang dilakukan desa maupun pihak lain yang dirasa memiliki kepentingan dalam membangun desa,

oleh sebab itu perlu adanya data yang mendeskripsikan kondisi tersebut atau salah satunya dengan melakukan pemetaan jejaring kelembagaan dalam suatu desa.

Pemetaan jejaring kelembagaan di Kecamatan Pugung didasarkan pada beberapa permasalahan yakni ambivalensi posisi desa berdampak lemahnya kelembagaan desa, Kecamatan Pugung merupakan Daerah Rawan Bencana Banjir yang sewaktu waktu melibatkan banyak lembaga baik saat mitigasi maupun recovery dan permasalahan lainnya karena Kondisi Infrastruktur Jalan Rusak Parah hal ini sebagai pertimbangan jejaring kelembagaan untuk bersinergi dalam pembangunan desa. Dengan adanya pemetaan jejaring kelembagaan di Kecamatan Pugung ini diharapkan pertama, teridentifikasinya bentuk *knowledge community* dan langkah-langkahnya dalam proses pemetaan jejaring kelembagaan desa di Kecamatan Pugung. Kedua, dapat terurai pula kekuatan pendekatan *knowledge community* yang mampu memetakan peran dan kepentingan jejaring kelembagaan desa di Kecamatan Pugung. Tujuan dari penulisan ini dapat dianalisis melalui metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi partisipan, *facilitating* dan *FGD community*.

B. PEMBAHASAN

Kelemahan kelembagaan desa di Kecamatan Pugung dapat dilihat dari struktur pemerintahan, kewenangan, dan keuangan desa. Akibat dari pemaksaan pencampuran kewenangan adat dan administrasi negara kedalam satu struktur birokrasi, pemerintahan desa tidak berjalan optimal. Di kasus lain, kepala desa yang notabene juga merupakan kepala adat sengaja menggunakan aturan yang ada untuk mendudukan anaknya sebagai sekretaris desa karena ada jaminan status PNS bagi kedudukan ini. Posisi ini jelas berpotensi konflik, setidaknya dapat mengganggu pemerintahan desa karena kecemburuan perangkat desa lainnya yang tidak memiliki status PNS. Persoalan yang juga penting adalah masa jabatan lembaga lembaga desa (kepala desa, BPD, dan perangkat desa). Di satu sisi, pemerintah memberi peluang terhadap mekanisme pemilihan, tetapi disisi lain pemerintah membatasi masa jabatan kades dan BPD. Jika desa diposisikan sebagai kesatuan

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

masyarakat adat, jenis kewenangan desa diserahkan kepada kebutuhan komunitasnya. Ini berarti pemerintah tidak perlu mengatur kewenangan kultural desa di dalam peraturan termasuk perda, bahkan dalam UU. Namun, jika pemerintah masih berkepentingan untuk meningkatkan pembangunan desa, harus ada penataan yang terpisah untuk lembaga yang menangani kewenangan administratif dan adat.

Masyarakat desa sebagai komunitas yang melakukan dan merasakan pembangunan di Kecamatan Pugung belum dilibatkan secara aktif karena kebijakan yang diturunkan bersifat top-down. Seiring implementasi UU No. 6 tahun 2014 yang bersifat dari atas ke bawah, pengetahuan masyarakat akan pembangunan semakin tesisihkan. Menghargai pengetahuan lokal adalah sebuah komponen esensial dari setiap pengembangan masyarakat. Di atas segalanya, anggota masyarakat memiliki pengalaman dari masyarakat tersebut, tentang kebutuhan dan masalah-masalahnya, kekuatan dan kelebihannya, serta ciri ciri khasnya. Mereka yang memiliki pengetahuan, kearifan, dan keahlian ini, dan peran pihak eksternal dalam hal ini tim pengabdian masyarakat dari perguruan tinggi bukanlah mengajari masyarakat tentang problem dan kebutuhan mereka (Holand & Blackburn, 1998).

Secara konseptual, pengetahuan lokal memiliki 2 bentuk, yakni pragmatis dan supranatural. Pengetahuan pragmatis adalah pengetahuan di dunia alamiah, objektif dan berlangsung. Sementara pengetahuan supranatural menyangkut nilai nilai kultural atau subjektif yang sering kali nilai nilai tersebut memodifikasi keinginan-keinginan orang atau suatu entitas (Rahmawati, 2008).

Bentuk Pengetahuan Masyarakat dalam Tahapan Pemetaan Jejaring Kelembagaan

Pemetaan jejaring kelembagaan desa di Kecamatan Pugung dominan berdasarkan pada pengetahuan supranatural. Pengetahuan supranatural masyarakat Kecamatan Pugung dapat didekati dengan memperhatikan bentuk bentuk dasar aturan, norma-normal, nilai nilai yang dihasilkan oleh budaya, agama dan moral. Hal ini terlihat dari proses pemetaan meliputi tahapan sebagai berikut:

1. Berdialog pada Informan Kunci. Yang pertama kali dilakukan untuk mendapatkan informasi

terkait kelembagaan desa, tim pemetaan (aparatur desa) berkunjung dan melakukan dialog kepada informan kunci. Informan kunci ini adalah mereka yang memahami urusan dan persinggungannya dengan pembangunan desa, dalam hal ini adalah tokoh adat, tokoh masyarakat, mantan pemimpin desa, tokoh populer desa dan pemilik informasi. Tujuan berdialog ini terkait identifikasi, peran dan saluran jejaring lembaga yang teridentifikasi.

2. *Focus group discussion*. Diskusi kelompok melibatkan anggota yang telah dipilih berdasarkan kesamaan latarbelakang. FGD ini dilakukan secara informal karena peserta diskusi adalah para penerima pembangunan di desa, penyandang masalah kesejahteraan sosial, dan para informan kunci di Kecamatan Pugung. Tim pemetaan menyimak petunjuk, mencatat proses diskusi dan kemudian memberikan komentar mengenai hasil pengamatannya. Sehingga terumuskannya silang sengkabut peran dan kepentingan lembaga-lembaga desa yang teridentifikasi.

3. Wawancara lembaga yang teridentifikasi. Wawancara difasilitasi oleh serangkaian pertanyaan yang diajukan kepada semua kelembagaan desa baik yang legal atau belum dalam suatu pertemuan terbuka. Aktivitas ini dalam rangka mengonfirmasi keterangan dan data yang berhasil dihimpun oleh tim pemetaan di Kecamatan Pugung.

4. Pengamatan Langsung (*Direct Observation*). Melakukan kunjungan lapangan atau pengamatan langsung terhadap kelembagaan masyarakat desa di Kecamatan Pugung. Data yang dikumpulkan dapat berupa informasi mengenai kondisi lembaga, informasi jejaringnya, sosial-ekonomi, sumber-sumber yang tersedia, interaksi sosial, dan peran serta kepentingannya.

5. Penyusunan Survey Kecil (*Mini-Survey*) oleh tim pemetaan. Penerapan kuesioner terstruktur (daftar pertanyaan tertutup) terhadap sejumlah kecil sample lembaga desa. Pemilihan responden dapat menggunakan teknik acak (random sampling) ataupun sampel bertujuan (purposive sampling). Hal ini bertujuan untuk finalisasi pemetaan jejaring peran dan kepentingan lembaga tersebut dalam pembangunan desa.

Tahapan tahapan tersebut membuat konstruksi dominan dari pengetahuan yang dihubungkan

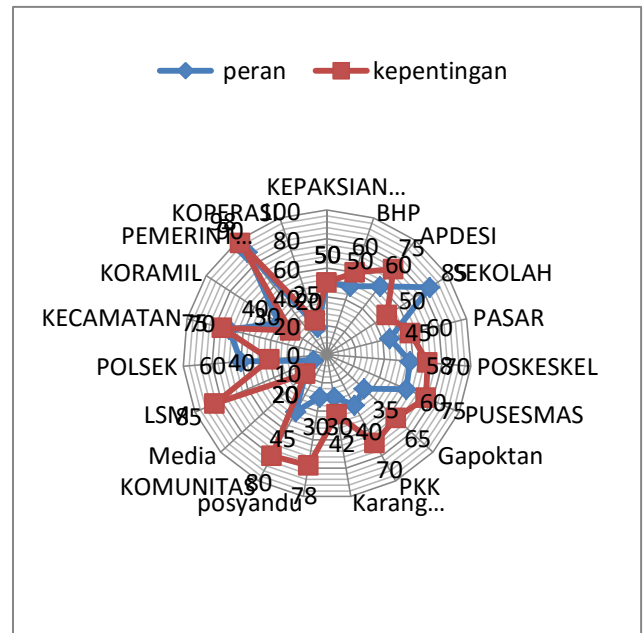
KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

dengan hal hal yang dipelajari di sekolah, atau di universitas. Kecenderungan pengetahuan lokal dan kontekstual yang dilihat universal dalam penyusunan dan penerapannya. Penyimpanan dan akses kepada pengetahuan lokal masyarakat saat ini semakin banyak menggunakan teknologi gawai, dan ini berarti bahwa pengetahuan telah menjadi serupa dengan sesuatu yang dapat disimpan dan diambil secara digital, namun dalam tahapan ini terdapat bentuk lain pengetahuan yang tidak demikian mudah disimpan atau diakses secara elektronik (Bowers, 2000). Tahapan ini juga mengidentifikasi bentuk lain dari pengetahuan lokal masyarakat di Kecamatan Pugung berupa spiritualitas anggota masyarakat, kekuatan gaib ketua lembaga dan informan kunci, kecantikan subjektif, alam, dongeng dan pengetahuan tentang wilayah (Knudtson & Suzuki, 1992).

Kekuatan utama sistem pengetahuan lokal dalam aspek ini adalah self-interest, dalam arti pengetahuan lokal menjadi kunci penting upaya konservasi, karena kekuatannya datang dari dalam masyarakat sendiri bukan pandangan dan pengetahuan dari luar. Kekuatan selanjutnya sistem pengetahuan menjadi komulatif artinya akumulasi dari pola adaptasi ekologis komunitas lokal yang telah berlangsung berabad-abad. Selain itu, pengetahuan sangat potensial untuk membantu mendesain upaya konservasi sumberdaya yang efektif karena dukungan lokal dan tingkat adaptasi serta pertimbangan practicability yang tinggi.

Setelah tahapan pemetaan tersebut dilakukan, teridentifikasi lembaga desa dan jejaringnya serta bagaimana lembaga tersebut berperan dan mengambil kepentingannya dalam pembangunan desa di Kecamatan Pugung. Untuk lebih jelasnya berikut adalah gambaran kelembagaan desa di Kecamatan Pugung.

Gambar 1. Jejaring Kelembagaan Desa Di Kecamatan Pugung



Sumber. Diolah peneliti 2019.

Berdasarkan hasil tersebut, dapat dilihat beberapa lembaga yang teridentifikasi dengan ukuran peran dan kepentingannya. Dari gambar terlihat bahwa lembaga pemerintah desa memiliki peran dan kepentingan yang signifikan dalam pembangunan desa, tidak hanya itu, pihak kecamatan juga memiliki porsi yang seimbang antara peran dan kepentingan. Anomali ditunjukkan oleh lembaga seperti LSM, yang memiliki peran minim namun kepentingan yang tinggi.

Gambaran peran dan kepentingan jejaring kelembagaan desa mewujudkan beberapa tujuan. Pertama, tersusunnya indikator bobot masalah dan jangkauan fasilitas pelayanan sosial dalam pengembangan jejaring kelembagaan. Kedua, diperolehnya peta digitasi sebagai dasar pengembangan informasi untuk penguatan kelompok-kelompok sosial. Ketiga, sebagai dasar penyusunan rencana kerja yang bersifat taktis terhadap permasalahan yang dihadapi dan keempat sebagai acuan dasar untuk mengetahui terjadinya proses perubahan sikap dan perilaku pada masyarakat.

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Pendekatan *knowledge community* (pengetahuan lokal masyarakat) dalam pemetaan sosial jejaring kelembagaan ditandai dalam bentuk pengetahuan supranatural menyangkut nilai nilai kultural atau subjektif yang sering kali nilai nilai tersebut memodifikasi keinginan. Bentuk pengetahuan lokal masyarakat ini mengalir di setiap tahapan pemetaan yaitu dialog pada informan kunci, FGD, wawancara lembaga, dan penyusunan mini survey hingga terpetakan jejaring kelembagaan desa beserta identifikasi peran dan kepentingannya serta teridentifikasinya pemetaan masalah sosial dan potensi/sumber sosial yang merupakan bagian dari analisis situasi dan analisis kebutuhan untuk kegiatan pengembangan jaringan kelembagaan desa. Tidak hanya itu, dengan pendekatan pengetahuan lokal masyarakat ini pula aparatur desa mampu menganalisis prioritas masalah dan lokasi untuk perencanaan kegiatan pengembangan jejaring kelembagaan desa.

Sebagai saran untuk kajian pendekatan pengetahuan lokal masyarakat ini dielaborasi dengan bentuk pengetahuan pragmatis yang objektif dan dapat diamati dengan cara *explanatory knowledge* dan *descriptive knowledge*. Sehingga kelembagaan lokal menjadi semakin berdaya dalam mengatur dan bernegosiasi dengan kekuatan dari luar.

REFERENSI

- Bower, C. 2000. *Let Them Eat Data: How Computers Affect Education, Culture Diversity and The Prospects Of Ecological Sustainability*, Athen, GA. University of Georgia Press.
- Holland, J & Blackburn, J. (Eds). 1998. *Whose Voice. Participatory Research And Policy Change*. London. Intermediate Technology Publication.
- Ife, Jim dan Tesoriero. 2008. *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di era globalisasi*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Knudston, P & Suzuki, D. 1992. *Wisdom of the elders*. Sidney. Allen &Unwin.
- Rahmawati, R. and Gentini, D.E.I., 2008. Pengetahuan lokal masyarakat adat

kasepuhan: adaptasi, konflik dan dinamika sosio-ekologis. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 2(2).

- Rudito, B. & Famiola, M. 2008. *Social mapping, metode pemetaan sosial, teknik memahami suatu masyarakat atau komuniti*. Bandung. Rekayasa Sains.

Sumber Internet

- RlsKominfo. 2019. Banjir Hanyutkan 6 Rumah di Pugung Sekda himbau Masyarakat Selalu Waspada. [http://lampung.tribunnews.com/2019/03/05/banjir-hanyutkan-6-rumah-di-pugung-sekda-himbau masyarakat selalu-waspada](http://lampung.tribunnews.com/2019/03/05/banjir-hanyutkan-6-rumah-di-pugung-sekda-himbau-masyarakat-selalu-waspada)
- Pamungkas, Sigit. 2019. Jalan Penghubung antar pekon di Pugung Tanggamus Rusak Parah Sudah seperti Kubangan Kerbau. <https://www.kupastuntas.co/2019/03/alan-penghubung-antar-pekon-di-pugung-tanggamus-rusakparah-sudah-seperti-kubangan-kerbau>

 3.0 | 2019



STIA LAN
BANDUNG

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

 3.0 | 2019



STIA LAN
BANDUNG

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI